



PERSOALAN GAS DI INDONESIA

Bagaimana mengganti batubara dengan bahan bakar gas fosil untuk energi tidak akan mencapai pengurangan emisi yang diperlukan.



Rencana Grup Bank Dunia (WBG) untuk mengembangkan infrastruktur gas di Asia memunculkan ancaman besar dalam memenuhi tujuan global Perjanjian Paris guna mencegah dampak paling bencana dari krisis iklim. Hal ini dikarenakan gas fosil terdiri dari hidrokarbon dan metana, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO₂). Saat gas fosil diproduksi, diangkut, dan dikonsumsi, metana dalam jumlah besar bocor sebagai emisi gas rumah kaca (GRK). Ini mengganggu upaya untuk mencegah krisis iklim. Pada 2019, gas menyumbang 22% dari semua emisi bahan bakar fosil.

Infrastruktur gas baru Indonesia akan mengunci emisi gas rumah kaca selama beberapa dekade mendatang, melemahkan upaya dekarbonisasi negara. Infrastruktur dan pengolahan gas fosil mengusur penduduk, merusak hutan bakau dan hutan hujan, mencemari laut, pesisir, serta menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hal ini juga mengunci Indonesia ke dalam ketergantungan pada industri gas fosil, dan berkontribusi secara signifikan terhadap eskalasi krisis iklim.

Survei Global Energy Monitor (GEM) tentang pembiayaan publik global menunjukkan bahwa lembaga keuangan publik menyediakan \$22,4 miliar dalam pembiayaan untuk proyek-proyek gas di Asia antara tahun 2014 dan 2018

Studi kasus dari Recourse, Traction Asia, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia menunjukkan bahwa Group Bank Dunia belum berkomitmen untuk mengakhiri pendanaan dan dukungan teknis gas fosilnya di Indonesia.

Rencana ekspansi gas Bank Dunia untuk Indonesia

Pada UN Climate Talks (COP26) di Glasgow, Pemerintah Indonesia menandatangani Global Methane Pledge. Dalam upaya melaksanakannya, ia berjanji untuk mengambil tindakan sukarela untuk berkontribusi pada upaya kolektif demi mengurangi emisi metana global setidaknya 30 persen dari tingkat tahun 2020 pada tahun 2030, yang dapat menghilangkan pemanasan lebih dari 0,2°C pada tahun 2050.

Namun, strategi krusial Bank Dunia saat ini untuk berinvestasi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, Kerangka Kerja Kemitraan Negara (CPF) 2021-24, mendukung “percepatan penyebaran gas alam dan biogas”. Dokumen strategis ini mencakup tujuan “meningkatkan iklim investasi bagi investor swasta dengan memperkuat tata kelola sumber daya alam, perencanaan infrastruktur gas, dan reformasi regulasi.” Disebutkan secara spesifik bantuan teknis yang direncanakan untuk mendukung gas dan sumber energi alternatif yang akan menjadi dasar untuk proyek-proyek gas baru di Indonesia. Perencanaan infrastruktur gas ini dapat mencakup pembangkit listrik tenaga gas fosil baru, jaringan pipa dan pelabuhan, terminal impor LNG, dan pabrik regasifikasi. Proyek-proyek tersebut diikuti dengan dampak lingkungan dan kesehatan serta emisi metana yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi GRK Indonesia.

Komitmen Bank Dunia tahun 2018 untuk mengakhiri pembiayaan hulu migas tidak meliputi pembiayaan tidak langsung. Pinjaman melalui perantara keuangan (FI) ini mendelegasikan tanggung jawab untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan dari sub-proyek kepada klien FI, seperti bank komersial atau entitas dana ekuitas swasta. Investasi FI mencakup lebih dari setengah dari total portofolio cabang sektor swasta Bank dunia, International Finance Corporation (IFC). Pinjaman IFC dan saham ekuitas di lembaga keuangan tetap membuka pintu untuk pembiayaan swasta bahan bakar fosil, termasuk batu bara dan hulu minyak dan gas.

Pembiayaan kebijakan pembangunan Bank Dunia (DPF) P177726 pada tahun 2022 untuk Reformasi Fiskal Indonesia sebesar \$500 juta, diserahkan kepada Dewan untuk disetujui pada April 2022. Pembiayaan Kebijakan Pembangunan (DPF) mendukung pemerintah melalui pembiayaan anggaran umum yang tidak memiliki peruntukan spesifik, tergantung pada reformasi atau “Tindakan Sebelumnya”. DPF ini bertujuan untuk menghapus pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pertambangan, dan pengeboran gas dan minyak. Namun DPF tidak mencakup rencana untuk memperpanjang penghapusan pembebasan PPN untuk infrastruktur batubara, gas dan minyak, termasuk pembangkit listrik, jaringan pipa dan pelabuhan, serta pengolahan produk turunan batubara.

Ketika Bank Dunia juga mendukung pengenalan pajak karbon baru melalui DPF ini, hal ini berisiko menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Perusahaan bahan bakar fosil kemungkinan akan membebankan biaya pajak karbon ini kepada konsumen di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kemiskinan dan mengurangi akses ke energi bagi mereka yang paling rentan.

Laporan Prospek Ekonomi Indonesia (IEP) Bank Dunia bulan Desember 2021 menguraikan skenario yang dimaksudkan untuk menggerakkan Indonesia menuju ekonomi dekarbonisasi yang makmur namun menjadi ancaman sebab mendorong negara ketergantungan gas . Penekanan skenario sangat tegas pada penghapusan batubara secara bertahap demi gas fosil dan energi terbarukan, tetapi mereka membayangkan penggandaan pembangkit listrik gas. Laporan IEP tidak pernah menganggap gas fosil sebagai penghasil emisi GRK yang signifikan.



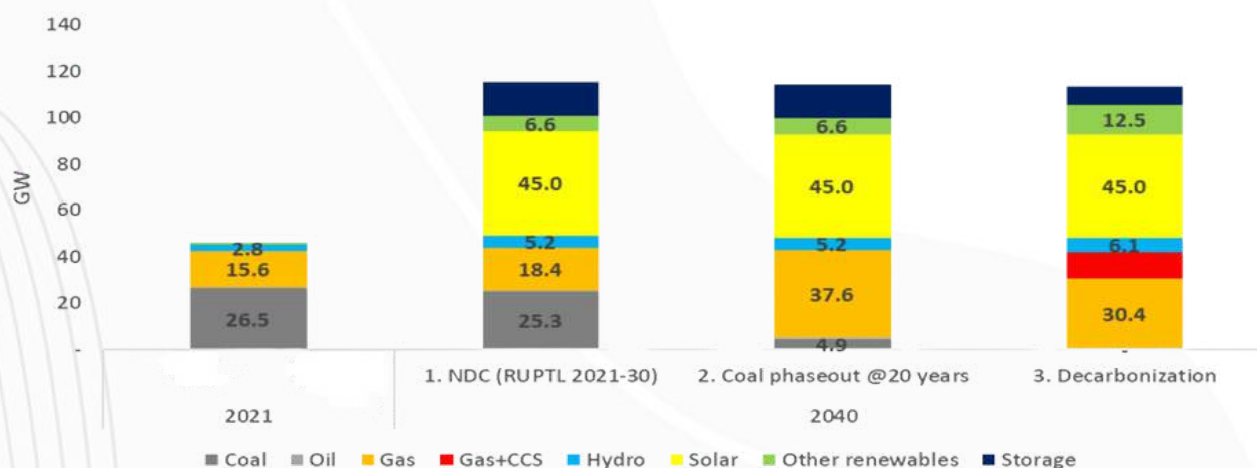
Komitmen Bank Dunia pada tahun 2018 untuk mengakhiri pembiayaan hulu migas tidak termasuk pembiayaan tidak langsung



Laporan IEP menyatakan hal menggembirakan bahwa "irradiasi matahari yang baik dan penurunan biaya peralatan menjadikan energi surya salah satu sumber produksi listrik dengan biaya terendah di Indonesia". Tenaga gas, di sisi lain, digambarkan "dapat dikirim dan berbiaya rendah" sehingga "sekali potensi matahari terpenuhi sepenuhnya, ada saklar untuk menggabungkan siklus turbin gas". Ini mengabaikan volatilitas harga ekstrim gas yang menyebabkan negara-negara menjadi tergantung pada impor gas dan membayar harga spot yang selangit

Dalam laporan IEP, skenario dekarbonisasi akan membuat Indonesia melipatgandakan kapasitas gas terpasangnya pada periode 2021 hingga 2040.

Kapasitas pembangkit listrik terpasang di 2021 dan 2040 dalam skenario transisi yang berbeda



Skenario ini bertentangan dengan peta jalan Net Zero Emissions dari Badan Energi Internasional pada tahun 2050 yang mengharuskan permintaan gas alam dunia menjadi lebih dari separuh untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 Celcius (C) .

Pendanaan publik Grup Bank Dunia membangkitkan kepercayaan atas kelayakan proyek, dan ini mendorong investasi sektor swasta. Dengan demikian, keuangan publik yang langka ini harus digunakan untuk membantu negara-negara beralih dari bahan bakar fosil. Namun di Indonesia, hal itu justru ditujukan untuk mendorong kepercayaan terhadap gas fosil. WBG memiliki peran penting dalam mengalihkan keuangan dari gas fosil untuk menyelaraskan investasi swasta dan kebijakan publik dengan tujuan Perjanjian Paris untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5C.

Membakar lebih banyak gas fosil seperti yang digambarkan dalam laporan IEP untuk Indonesia akan melemahkan kemampuan negara dalam mencapai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dalam memenuhi Perjanjian Paris, dengan berkontribusi pada peningkatan emisi GRK yang berkelanjutan ketika penurunan tajam seharusnya diperlukan untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim.



Dalam laporan IEP, skenario dekarbonisasi akan membuat Indonesia menggandakan kapasitas gas terpasangnya pada periode 2021 hingga 2040

Bagaimana Bank Dunia mendukung perluasan proyek pencairan gas fosil Tangguh BP:

Bahkan di tahun 2015, tahun Perjanjian Paris, Bank Dunia mengunci investasi gas fosil di Indonesia. Hasil Laporan Bank Dunia tentang pinjaman DPF Energi Inklusif dan Berkelanjutan Pertama Indonesia sebesar \$500 juta menetapkan indikator pengembangan program khusus gas. Indikator-indikator ini mengharuskan PLN untuk membuat perjanjian jangka panjang baru untuk pasokan gas domestik dan/atau antar pulau. DPF secara khusus bertujuan untuk meningkatkan " pangsa gas dalam pembangkit listrik dan [mempromosikan] penggunaan gas di berbagai sektor industri hilir".

Sebagai hasilnya, pada 2016, jumlah kontrak gas PLN untuk PLTU Jawa 2 dari proyek Tangguh BP meningkat dua belas kali lipat pada 2020, dari 17 menjadi 218 juta kaki kubik per hari. Tangguh saat ini merupakan lapangan penghasil gas terbesar di Indonesia. Produksi dari lapangan lepas pantai akan ditingkatkan hingga 35% dari total produksi gas Indonesia setelah fasilitas ketiga yang baru mulai beroperasi.

Proyek pencairan Tangguh sedang menerapkan Pemanfaatan dan Penyimpanan Carbon Capture (CCUS) yang diklaim perusahaan akan mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbonnya antara 29% dan 41% pada tahun 2030 dibandingkan praktik bisnis konvensional. Tetapi CCUS terus menghadapi ketidakpastian yang signifikan tentang seberapa ekonomisnya, atau seberapa cakupannya untuk menanggapi besarnya masalah emisi. Risiko CCUS digunakan oleh WBG untuk membenarkan upaya eksploitasi lanjutan dari cadangan bahan bakar fosil atau memberikan prioritas dibandingkan investasi sumber energi terbarukan yang berkelanjutan.

Melompati gas fosil dalam bauran energi Indonesia

Pada tahun 2021, perusahaan energi negara Indonesia Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluarkan apa yang disebut Rencana Usaha Ketenagalistrikan (RUPTL) "hijau" yang menandai komitmen baru bagi Indonesia untuk mengurangi emisi. Hal ini juga menyoroti perlunya investasi yang signifikan dalam kapasitas daya terbarukan dan fleksibilitas jaringan.

Namun, para ahli energi Indonesia mencatat bahwa rencana energi baru ini tidak memenuhi apa yang dibutuhkan karena pada tahun 2030 batubara masih akan mencakup 59,4% dari bauran energi. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar rencana perluasan energi terbarukan didasarkan pada proyek hidro dan panas bumi yang besar, yang memiliki biaya lingkungan dan sosial yang besar. Juga ketika pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menutup sejumlah pembangkit listrik tenaga batubara, diganti dengan beberapa pembangkit listrik tenaga gas baru dengan proyeksi kapasitas 6000 megawatt (MW).

PLN telah terkunci pada daya beban dasar yang tidak dibutuhkan, dengan masalah kelebihan kapasitas yang besar. Ini disebabkan karena pembangkit batubara yang sudah dibangun atau di bawah persyaratan perjanjian pembelian listrik ketat yang membutuhkan pembayaran besar kepada Produsen Listrik Independen (IPP) asing. Kapasitas tenaga batubara di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir .

Tantangan bagi Indonesia untuk keluar dari batubara dan melompat ke energi terbarukan yang berkelanjutan sangat besar, dan membutuhkan dukungan yang signifikan dari pendanaan publik. Rencana kelistrikan nasional (RUPTL 2021-2030) menetapkan target utama transisi rendah karbon untuk sektor ini. Prakiraan rencana dalam rancangan ini, pangsa energi terbarukan dalam total produksi listrik diharapkan meningkat dari 12 menjadi 23 persen pada 2020-2025 untuk mencapai komitmen Indonesia berdasarkan Perjanjian Paris. Keuangan publik - seperti yang berasal dari WBG - harus memiliki peran sentral dalam mendukung upaya ini.



Bank Dunia dan IFC harus membantu Indonesia untuk melompat dari batubara ke energi bersih

Gasifikasi batu bara merupakan hambatan lain bagi komitmen Bank Dunia untuk mengakhiri pembiayaan batubara. Perusahaan dan pembuat kebijakan Indonesia masih mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya batubara domestik dan akan terus melakukannya sampai insentif mendukung pengembangan energi terbarukan. RUU Energi Terbarukan (RUU EBT) baru, yang sedang diperdebatkan di parlemen Indonesia pada April 2022, mengklasifikasikan 'gasifikasi batubara' sebagai 'energi baru', dengan kesimpulan bahwa insentif akan tersedia untuk mendukung pengembangannya. Rencana gasifikasi batubara berisiko memicu permintaan untuk cadangan batubara peringkat rendah, yang menghasilkan emisi GRK yang lebih tinggi dan dampak lingkungan negatif lainnya.

GRUP BANK DUNIA HARUS:



Segera mengalihkan pendanaan langsung dan tidak langsung dari gas fosil untuk menyelaraskan investasi swasta, kebijakan publik, dan praktik dengan tujuan Perjanjian Paris agar menjaga pemanasan global di bawah 1,5C;



Pengalokasian secara khusus atas pembiayaan publik untuk energi di Indonesia yang mendukung transisi yang adil beralih dari batubara; untuk melompati fase pembangunan gas dan untuk mendukung sumber energi lokal, berkelanjutan dan terbarukan;



Membiayai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan meningkatkan dukungan atas penyimpanan energi serta modernisasi jaringan agar memungkinkan lebih banyak energi terbarukan untuk diintegrasikan ke dalam sistem tenaga;



Mengecualikan dukungan untuk teknologi mahal yang belum terbukti dan solusi palsu seperti gasifikasi batubara dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) yang terus membenarkan eksploitasi bahan bakar fosil dan pembangkit listrik bahan bakar fosil baru.

Publikasi dari : Recourse, Greenpeace Indonesia, Traction Asia and Trend Asia

STOP PENDANAAN GAS

Kraijenhoffstraat 137A
1018 RG Amsterdam
The Netherlands
www.re-course.org

